

SKRIPSI

**PERWUJUDAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KONSEP
VALUE FOR MONEY DALAM PENGELOLAAN AKUNTANSI
KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA BAPPEDA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

***THE REALIZATION OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND THE
CONCEPT OF VALUE FOR MONEY IN THE MANAGEMENT OF
PUBLIC SECTOR FINANCIAL ACCOUNTING IN
BAPPEDA POLEWALI MANDAR DISTRICT***



NUR AINIA

C02 18 374

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

**PERWUJUDAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN
KONSEP *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGELOLAAN
AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA
BAPPEDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Nur Ainia

C02 18 374

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak.
NIP : 198404252015042001

Pembimbing II

Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak.
NIDN : 0022029304

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M. S.Pd., M.Ak.
NIP : 1983120320190320006






**PERWUJUDAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN
KONSEP *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGELOLAAN
AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA
BAPPEDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan telah disusun oleh

**NUR AINIA
C02 18 374**

Telah diuji dan diterima Panitia Ujian
Pada Tanggal 13 Oktober 2023 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak	Ketua	1..... 
2. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak	Sekretaris	2..... 
3. Taufik Hidayat B Tahawa, S.E., M.Ak	Anggota	3..... 
4. Eni Novitasari, S.E., M.Si	Anggota	4..... 
5. Aswar Rahmat, S.E., M.Si	Anggota	5..... 

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I



Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak.
NIP : 198404252015042001

Pembimbing II



Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak.
NIDN : 0022029304



**Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi**
(Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB)
NIP : 19670325 199403 2001

ABSTRAK

Nur Ainia, Perwujudan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada BAPPEDA Kabupaten Polewali Mandar, dibimbing oleh Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak dan Sufyan Amirullah, S.E.,M.Ak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada BAPPEDA Kab. Polewali Mandar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perwujudan konsep *value for money* terhadap kinerja di BAPPEDA Kab. Polewali Mandar. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode *interview* (wawancara langsung) yang dilakukan kepada beberapa pegawai yang ada di kantor BAPPEDA Kab. Polewali Mandar dan juga memperoleh data dokumen dari tempat penelitian.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perwujudan transparansi sudah diterapkan dengan baik dengan adanya keterbukaan informasi dan juga proses nilai akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik dan pemerintah sudah sesuai dengan aturan, ini dibuktikan dengan dibuatnya *website* yang bisa di akses kapan saja dan oleh siapapun dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah dan juga sebagai bentuk transparansi anggaran oleh suatu instansi. Adapun proses pengelolaan keuangan akuntansi di Kantor BAPPEDA Kab. Polewali Mandar menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Pada konsep *Value For Money*, dapat dilihat dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) rasio menunjukkan hasil yang kurang baik, kedua rasio tersebut adalah rasio efektivitas dan efisiensi. Sedangkan rasio yang menunjukkan hasil baik adalah rasio ekonomis di BAPPEDA Kab. Polewali Mandar.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, *Value For Money*, Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik, BAPPEDA.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Sektor Publik menggunakan akuntansi sektor publik sebagai salah satu cara mereka bertanggung jawab kepada masyarakat umum. Masyarakat mengharapkan lembaga publik untuk melakukan semua bisnis mereka secara terbuka dan bertanggung jawab. Pengelolaan anggaran yang efektif sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi karena berdampak langsung pada kelangsungan hidup banyak orang. Akuntabilitas dan transparansi adalah komponen penting dari tata kelola yang efektif. (Pertiwi & Putri 2015:2).

Sekarang, lebih dari sebelumnya, praktik akuntansi baik dientitas pemerintah maupun non-pemerintah mendapatkan pertimbangan khusus. Akuntabilitas dan transparansi adalah dua konsep panduan yang memungkinkan untuk menjelaskan semua tindakan dan hasil pengelolaan keuangan kepada publik, yang merupakan penengah terakhir. Jika manajemen anggaran organisasi yang terlibat terbuka dan mudah dipahami, organisasi dapat mencapai kinerja anggaran yang baik.

Menjalankan akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan prinsip dasar tata pemerintahan yang sehat, merupakan salah satu upaya pemerintah (*good governance*). Menteri Dalam Negeri telah menetapkan selain Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang

petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah, diterbitkan oleh Mendagri dan dimuat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut.

Semua standar tersebut pada hakekatnya meminta tanggung jawab dan keterbukaan dalam penanganan pelaporan keuangan. Kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas harus ada. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan perubahan pada cara penyajian laporan keuangan, termasuk persyaratan bahwa karena operasi pemerintah, pemerintah dapat menyiapkan segala bentuk informasi mengenai keuangan yang berhubungan dengan kejujuran dan transparan pada khalayak umum.

Masyarakat mengantisipasi bahwa pengelolaan keuangan daerah akan menjunjung standar akuntabilitas dan keterbukaan tersebut. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1999, yang mengamanatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk semua lembaga pusat dan daerah sampai eselon II, menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi. UU-KIP No. 14 Tahun 2008, yang mengatur transparansi dalam tindakan dan kegiatan kota, diadopsi sebagai tanggapan terhadap pentingnya penyebarluasan informasi terkait kegiatan pemerintahan daerah.

Kewajiban untuk menginformasikan, menanggapi dan menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum atau pengurus kolektif (pemimpin) organisasi kepada orang yang memiliki akses atau berwenang untuk mengakses informasi tersebut, adalah yang dimaksud dengan aspek akuntabilitas. Disisi lain, transparansi mengacu pada kesediaan pemerintah untuk berbagi

informasi dengan pihak yang meminta informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber daya publik.

Jika keterbukaan dan akuntabilitas diterapkan dalam setiap kinerja pemerintahan, maka kedua faktor tersebut di atas (transparansi dan akuntabilitas) akan menghasilkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah. Secara tidak langsung, keadilan dalam pelayanan publik dapat dicapai melalui peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah. Keadilan publik hanya dapat dicapai jika peraturan dikomunikasikan secara transparan dan hasil implementasinya dapat diakses oleh publik sehingga mereka dapat membandingkan kualitas layanan yang mereka terima dengan layanan yang diberikan kepada orang lain.

Kebutuhan mendasar untuk *value for money* adalah pengelolaan anggaran yang baik. Implementasi *value for money* dianggap bisa meningkatkan manajemen keuangan di sektor publik. *Value for money* adalah pendekatan pengelolaan anggaran di sektor publik, berdasarkan pada tiga komponen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* bisa dicapai jika lembaga menggunakan biaya input terendah untuk menghasilkan tingkat output tertinggi untuk memenuhi tujuannya (Nababan, 2018). Konsep ekonomi mengacu pada pemilihan dan pemanfaatan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan biaya terendah. Efisiensi adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya publik (*public money*). Efektivitas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran harus menghasilkan pencapaian tujuan atau sasaran kepentingan publik.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 21/2011, pengelolaan keuangan daerah adalah kelengkapan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengendalian keuangan daerah. Dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat, keuangan daerah dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Sangat penting untuk menciptakan transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh BAPPEDA harus menghormati prinsip keterbukaan dan pertimbangan untuk efisiensi ekonomi, dan output yang dihasilkan dari semua tindakan harus benar-benar efektif.

Komponen pendukung Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), disebut juga dengan *Development Planning Agency at Sub-National Level* dalam bahasa Inggris. Lembaga teknis daerah yang bergerak di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah disebut BAPPEDA. Biasanya, seorang kepala dinas yang sepenuhnya bertanggung jawab kepada pemerintah daerah terkait mengawasi BAPPEDA. Baik melalui Sekretaris Daerah, Gubernur, Bupati, maupun Walikota.

Pembentukan Badan Perencanaan Daerah di Daerah Tingkat I dan II yang disebut Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, yang menjadi dasar pembentukan BAPPEDA. Bagian keempat Pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kemudian digabungkan dengan landasan tersebut di PP RI no. 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan kata lain, BAPPEDA merupakan organisasi yang bukan bagian dari suatu departemen dan diurus serta dipertanggungjawabkan langsung oleh Kepala Daerah. Atau lebih sederhananya, BAPPEDA bertugas menyusun dan melaksanakan strategi perencanaan dan pembangunan daerah. Kepala Badan membawahi BAPPEDA yang melapor kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah.

Kejadian yang melibatkan keresahan masyarakat dan pengaduan dalam pelayanan umum, baik langsung atau melalui media, seperti pengaduan langkah berbelit-belit, ketidakpastian tanggal penyelesaian, kisaran biaya dan persyaratan yang tidak jelas, petugas/pengawas yang kurang cakap/tanggap. Reputasi buruk yang masih melekat pada sebagian lembaga publik yang diperparah dengan kurangnya profesionalisme pegawai di organisasi pelayanan publik.

Sejalan dengan penuturan diatas penulis menemukan salah satu artikel yang dikutip oleh Faktual.net November 2021 yang menyatakan buruknya pelayanan publik Pemerintah Kec. Barombong, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan. Dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Camat Barombong Anwar Asru S.Sos jauh dari kata baik yang dimana terkait dengan jangka waktu pelayanan yang tidak jelas, petugas pelayanan yang tidak berkompeten, dan pengaduan masyarakat yang tidak ditanggapi. Berdasarkan hal tersebut, LSM-INTAI mengadakan Camat Barombong tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan. Ketua Umum LSM INTAI Syaripuddin T, mengatakan bahwa seorang pejabat publik harusnya mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Sementara kejadian-kejadian tersebut menjadi pengingat akan pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap peran tanggung jawab langsung dalam pelayanan publik untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Karena inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar dan menilai bagaimana dan seperti apa organisasi publik yang ada di Polewali Mandar yang dimana penelitian ini akan berfokus pada salah satu organisasi sektor publik yaitu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Polewali Mandar.

Fenomena yang dapat diamati di kantor BAPPEDA Polewali Mandar dan menurut salah satu pegawai Ibu Sitti Rohana, S.E. selaku kepala Sub Bagian Keuangan mengatakan Fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir mengenai transparansi, akuntabilitas dan *Value for Money* di BAPPEDA Kabupaten Polewali Mandar kadang masih ditemukan adanya kerugian, ketidakhematan, ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan masih belum maksimal beberapa tahun terakhir, tetapi semakin bertambahnya waktu pengelolaan keuangan mulai mengalami perbaikan tetapi belum cukup memuaskan dan berkaitan dengan transparansi publik direkomendasikan juga untuk dimuat dalam laman *website* pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Agar pemerintah daerah dapat mencapai pemerintahan yang baik, yang digambarkan sebagai pemerintah daerah yang transparan, bertanggung jawab,

ekonomis, dan efisien, konsep *value for money* adalah hal yang perlu dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan daerah (Siregar 2012).

Berkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber penelitian penulis, penelitian Achmad dan Saleh (2020) berjudul Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam penyusunan anggaran menunjukkan akuntabilitas berpengaruh baik dan signifikan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Luwu Timur. Kinerja penganggaran pada kantor pemerintah Kab. Luwu Timur terkena dampak positif dan signifikan dari penguncian anggaran. Berdasarkan temuan uji regresi tersebut, partisipasi anggaran merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Luwu Timur.

Selain itu, Kajian Nasution (2018) tentang Dampak Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hanya sebagian kecil dari pengelolaan, *accountability*, dan keterbukaan keuangan daerah yang berdampak positif. Memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, tinjauan Laoli (2019) dengan judul Pemerintah Kabupaten Nias tentang dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran dengan Konsep *Value for Money* menunjukkan bahwa meskipun variabel transparansi memiliki dampak yang tidak signifikan secara parsial, namun akuntabilitas memiliki dampak parsial terhadap kinerja anggaran dari konsep *Value for Money*.

Selain itu, *Accountability* dan konsep *value for money* berdampak pada kinerja anggaran secara bersamaan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Perwujudan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Konsep *Value for Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada BAPPEDA Kabupaten Polewali Mandar**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perwujudan transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada BAPPEDA Kab. Polewali Mandar?
2. Bagaimana perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada BAPPEDA Kab. Polewali Mandar?
3. Bagaimana perwujudan konsep *value for money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik untuk meningkatkan kinerja pada BAPPEDA Kab. Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perwujudan transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada BAPPEDA Kab. Polewali Mandar.

2. Untuk mengetahui perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada BAPPEDA Kab. Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui konsep *value for money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik dalam meningkatkan kinerja pada BAPPEDA Kab. Polewali Mandar.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diantisipasi akan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan serta dari sudut pandang teoritis dan praktis. Mengenai keunggulan penelitian, terutama:

- 1.4.1** Secara teoritis, penelitian ini akan membantu memajukan ilmu pemerintahan secara umum dengan merangsang manfaat akademis dalam bentuk brainstorming. Selain itu, penelitian ini dapat dikutip dalam karya ilmiah lainnya.
- 1.4.2** Manfaat praktis : Harapannya penelitian ini dapat membantu Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pada BAPPEDA, mengukur kinerja dengan *value for money*, dan akan menguntungkan mereka yang menggunakan laporan keuangan dan manajemen pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Akuntansi ada untuk memastikan bahwa suatu entitas akuntabel dan bertanggung jawab atas manajemen pihak yang berkepentingan. Akibatnya, akuntansi hadir dalam organisasi sektor publik, yang membantu dalam pengelolaan transaksi keuangan dan pencapaian tujuan organisasi. Akuntansi adalah proses menemukan, mewujudkan, menilai, mendokumentasikan, dan melaporkan transaksi atau kejadian yang memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan keuangan.

Tiga item sering dimasukkan dalam teknik akuntansi: pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Menentukan apakah suatu transaksi atau kejadian merupakan peristiwa ekonomi sebagai bagian dari proses pengakuan. Pengakuan juga memerlukan penentuan apakah suatu transaksi yang melibatkan peristiwa ekonomi memenuhi persyaratan tertentu tergantung pada asumsi yang dibuat dalam basis akuntansi. Selain itu, apakah peristiwa ekonomi dapat dinilai dari segi uang atau nilainya penting karena jika tidak, transaksi tidak akan dicatat. Mencatat buku harian dan membuat laporan keuangan adalah bagian dari pengungkapan. Akuntansi anggaran, komitmen, dana, kas, dan akrual adalah beberapa contoh metode akuntansi keuangan yang berasal dari sektor publik dan dapat digunakan. Kelima teknik saling menguntungkan dengan baik dan tidak bertentangan satu sama lain, atau memotong prinsip kerja. Tujuan akuntansi anggaran adalah untuk

menyoroti pentingnya anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Dengan demikian, diperkirakan bahwa proses penyusunan laporan akan sederhana.

Akuntansi kas dan akuntansi akrual dapat digunakan bersamaan dengan akuntansi komitmen. Bagi pemegang saham, akuntansi komitmen sangat penting karena berkaitan dengan prinsip dasar tentang bagaimana transaksi harus dicatat. Akuntansi dana digunakan ketika investor atau penyedia dana memiliki anggaran terbatas dan berusaha mengalokasikan sumber daya mereka untuk operasi yang paling penting. Manfaat akuntansi kas adalah transparansi kegiatan administrasi dikerjakan oleh bendahara ataupun akuntan. Kerugian dari akuntansi kas adalah saldo yang tersedia terlalu besar (*overstated*) kemudian menciptakan pemborosan bagi bisnis atau organisasi. Karena temuan akuntansi akrual lebih akurat daripada akuntansi kas, maka akuntansi akrual ini lebih banyak digunakan.

Laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Sistem akuntansi sektor publik dan standar akuntansi keuangan diperlukan untuk menyediakan pelaporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya untuk pemerintah. Karena kaliber standar ini akan secara langsung mempengaruhi kaliber laporan keuangan, mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk sektor publik menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan sistem yang dapat dipercaya yang dapat mempermudah penyediaan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Di sektor korporat, tantangan dengan manufaktur, pemasaran, dan manajemen keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kurangnya pendanaan

dapat berdampak buruk pada operasi operasional dan kemampuan organisasi untuk bertahan hidup.

2.1.2 Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Semua prosedur tata kelola didasarkan pada akuntabilitas, dan efisiensi proses ini bergantung pada bagaimana individu yang berwenang menggambarkan bagaimana mereka menjunjung tinggi kewajiban hukum dan konstitusional mereka. Akuntabilitas adalah prasyarat mendasar untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin bahwa otoritas digunakan dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan penilaian tertinggi untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar.

Tanggung jawab/akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab pertanyaan dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk menuntut informasi atau tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan untuk membenarkan kinerja dan keputusan seseorang atau badan hukum yang mengelola organisasi. (Yulianto 2016:5).

Mardiasmo (2018:27) Akuntabilitas publik didefinisikan sebagai tanggung jawab orang yang memegang amanah (*agen*) untuk memberikan transparansi atas semua tindakannya dan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*), yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk memintanya. Menurut Sujarweni (2015:30), akuntabilitas atau tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi seseorang (pemimpin, pejabat, atau eksekutif)

untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang relevan.

2. Indikator Akuntabilitas

Organisasi sektor publik dituntut untuk melaksanakan akuntabilitas publik pada beberapa tingkatan. Aspek akuntabilitas menurut Mahmudi (2016:19) adalah sebagai berikut::

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Institusi publik memiliki tanggung jawab untuk berperilaku jujur dalam pekerjaan mereka dan mematuhi persyaratan hukum yang relevan. Ini dikenal sebagai akuntabilitas hukum. Tanggung jawab hukum terkait dengan pelayanan publik, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2004.

- b. Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*).

Lembaga publik memiliki akuntabilitas manajerial dalam menjalankan organisasi mereka dengan sukses dan efisien. Akuntabilitas kinerja adalah cara lain untuk mendefinisikan tanggung jawab. Akuntabilitas proses, yang terhubung dengan akuntabilitas manajerial dan memerlukan tanggung jawab untuk proses organisasi, memastikan bahwa tidak ada inefisiensi atau ketidakefektifan organisasi.

c. Akuntabilitas program (*program accountability*).

Akuntabilitas program melibatkan evaluasi apakah tujuan layak untuk dipenuhi dan apakah organisasi telah memikirkan program pengganti yang memberikan hasil terbaik dengan biaya serendah mungkin.

Program yang dibuat oleh entitas publik hingga pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, akuntabilitas program mensyaratkan bahwa program organisasi memiliki kualitas tinggi dan mendukung strateginya serta pencapaian tujuan, visi, dan sasarannya.

d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Dalam hal tanggung jawab atas kebijakan yang diambil, lembaga publik harus dimintai pertanggungjawaban.

e. Akuntabilitas finansial (*financial accountability*).

Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban badan publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara bijaksana, efektif, dan tanpa pemborosan, kebocoran uang, atau korupsi.

3. Jenis Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2015:9) akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah ketika seseorang bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya termasuk tanggung jawab kepala dinas kepada walikota atau bupati, pertanggungjawaban menteri kepada presiden, pertanggungjawaban

kepala unit kepada kepala cabang, pertanggungjawaban kepada CEO, dan sebagainya.

- b. Akuntabilitas kepada publik yang lebih luas atau kepada semua institusi lain tanpa koneksi atasan-bawahan dikenal sebagai akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

2.1.3 Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah salah satu komponen terpenting dari manajemen keuangan yang sehat. Komponen informasi independen memberikan landasan transparansi. Pemangku kepentingan harus dapat mengakses semua lembaga, prosedur, dan informasi pemerintah, dan informasi tersebut harus cukup komprehensif untuk dipahami dan dipantau.

Menurut teori pemerintah, transparansi adalah konsep yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang pemerintahan, yaitu pengetahuan tentang kebijakan, pembangunan, implementasi, dan hasil. Salah satu aturan tata kelola yang baik (*good governance*) adalah transparansi.

Transparansi merupakan transparansi pemerintah dalam merumuskan keputusan sehingga publik dapat mengetahuinya. Dikutip dari kompasiana.com bahwa transparansi memiliki lima unsur sebagai berikut: 1) Transparansi dalam pertemuan-pertemuan penting di mana masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya; 2) Transparansi informasi terkait surat kabar yang perlu diketahui publik; 3) Transparansi dalam proses; 4) Keterbukaan register

yang menyimpan fakta hukum; dan 5) Transparansi dalam menerima masukan masyarakat.

Menurut Edowai dkk (2021:32) Transparansi, yang dapat dilihat sebagai keterbukaan dalam cara suatu kegiatan dilakukan, merupakan salah satu prasyarat utama untuk mengembangkan tata kelola yang efektif. Kewajaran dapat didorong dengan memastikan keterbukaan dalam semua kebijakan tata kelola. Selain itu, peraturan pemerintah juga mencakup keterbukaan. Menurut Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kepatuhan. Hal itu juga dilakukan dengan tertib, sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang terkait, dan dengan cara yang bertanggung jawab. Mencermati pengertian transparansi di atas, dapat dikatakan bahwa transparansi adalah asas yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, khususnya informasi tentang kebijakan, pembuatan dan pelaksanaannya, dan hasilnya.

2. Prinsip Transparansi

Menurut Lauranti (2018:67) Beberapa indikator seperti di bawah ini setidaknya dapat digunakan untuk mengukur konsep transparansi pemerintah:

- a. Semua penyelenggaraan pemerintahan bersifat transparan dan terstandar menurut kerangka yang sederhana dan mudah dipahami.

- b. Adanya metode/memfasilitasi untuk memuat pertanyaan publik tentang prosedur tata kelola pemerintahan menjadi lebih mudah.
- c. Terdapat sistem untuk melaporkan dan berbagi rincian tentang anomali dalam perilaku pejabat publik dalam menjalankan bisnis pemerintah.

Dalam rangka pengembangan masyarakat, pemerintah diharapkan menjalin hubungan yang luas dengan masyarakat dalam berbagai topik. Masyarakat memiliki hak untuk diberitahu tentang berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan tugasnya.

3. Dimensi Transparansi dan Indikator Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Mardiasmo (2018:19) menyatakan Transparansi memiliki beberapa dimensi yaitu:

1. *Invormativeness* (informatif), Alur informasi, berita, penjelasan sistem, proses, data, dan fakta semuanya diberikan kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat. Indikator yang bersifat edukatif, menurut Mardiasmo (2018:19) antara lain :
 - a. Tepat waktu : Laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai landasan pilihan dalam ekonomi, masyarakat, dan politik serta untuk mencegah keterlambatan dalam pengambilan keputusan tersebut.

- b. Memadai : Aturan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan pelaporan laporan keuangan untuk memberikan pengungkapan yang tepat dan bermanfaat atas pos-pos signifikan.
 - c. Jelas : Informasi harus jelas agar dapat dimengerti dan mencegah kesalahpahaman.
 - d. Akurat : Pengguna yang menerima dan menggunakan informasi tersebut tidak boleh disesatkan oleh informasi yang tidak akurat. Akurasi juga menyiratkan bahwa informasi harus cukup menyampaikan tujuan.
 - e. Laporan keuangan yang sebanding harus dibandingkan dengan lembaga serupa dan lintas periode waktu. Keterbandingan adalah kemampuan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja organisasi lain yang dapat diperbandingkan dengan menggunakan laporan keuangan.
 - f. Akses yang mudah mensyaratkan bahwa semua pihak memiliki akses yang mudah terhadap informasi.
2. *Openness* (keterbukaan), yaitu Keterbukaan informasi publik menekankan bahwa semua informasi publik harus terbuka dan tersedia bagi semua pengguna informasi dan memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi melalui akses terhadap data di entitas publik.
3. *Disclosure* (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholder*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Adapun indikator dari pengungkapan antara lain :

- a. situasi moneter. pemahaman menyeluruh tentang organisasi atau situasi keuangan organisasi selama periode waktu tertentu.
- b. komposisi unit manajemen organisasi (unit kerja). Struktur organisasi menunjukkan alokasi tugas dan koordinasi berbagai operasi dan kegiatan.
- c. Metodologi perencanaan dan hasil kegiatan. serangkaian langkah yang diambil untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Ultafiah (2017:53) adapun indikator dari transparansi antara lain :

1. informasi yang jelas tentang perencanaan, metode pelaksanaan, dan akuntabilitas tersedia dan dapat diakses;
2. Masyarakat dilibatkan dalam diskusi.;
3. metode pengelolaan yang transparan;
4. Berbagi informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan desa.

4. Manfaat Transparansi

Transparansi memerlukan akses informasi yang bebas dan tidak terbatas, termasuk undang-undang, aturan, dan dokumen lain yang tersedia untuk umum. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi diciptakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kebebasan arus informasi yang cukup untuk dipahami dan dipantau. kebijakan, serta berbagi informasi, publik dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dengan menawarkan ambisi atau suara, meskipun hanya dalam sejumlah kecil komponen. Karena semua prosedur dan hasil pemerintah dapat dilihat, transparansi juga dapat

membantu menurunkan kemungkinan penipuan, korupsi, dan kesalahan lainnya di dalam pemerintahan.

Melalui penyediaan informasi, manfaat transparansi dapat menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah sekaligus menjamin kemudahan dalam mengakses informasi yang akurat dan mudah dipahami. Menurut Andrianto (2017:21), ada berbagai manfaat keterbukaan, diantaranya:

- a. mencegah para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi melakukan korupsi.
- b. Lebih mudah untuk menentukan manfaat dan kelemahan kebijakan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik sehingga masyarakat umum dapat lebih mudah menilai efektivitas lembaga.
- d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan lembaga.
- e. Berkat kepercayaan publik terhadap institusi, hubungan sosial antara masyarakat dan masyarakat atau antara masyarakat dan pembuat kebijakan semakin kuat.
- f. Mampu mempromosikan lingkungan yang menguntungkan untuk investasi dan meningkatkan kepastian usaha.

2.1.4 Value For Money

1. Pengertian Value For Money

Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for money* adalah ukuran kinerja sektor publik yang menunjukkan

apakah anggaran (dana) yang dikeluarkan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat. *Value for money* adalah yang memiliki apresiasi terhadap nilai uang dalam organisasi sektor publik, menurut Mahmudi (2015). Hal ini menunjukkan perlunya menghargai setiap rupiah secara adil dan memanfaatkannya secara maksimal. Menurut Arisaudi (2016), nilai uang berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja organisasi pemerintah dalam hal ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2. Indikator *Value For Money*

Jamaluddin Majid (2019:18) menjelaskan mengenai tiga indikator utama dalam *value for money* yaitu sebagai berikut :

- a. Ekonomi. Istilah "ekonomi" sering digunakan untuk menyinggung berhemat, yang juga mencakup kemanjuran, manajemen yang hati-hati/bijaksana, dan tidak ada pemborosan. Jika operasi bisnis dapat menghilangkan atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, itu dianggap sehat secara ekonomi. Memperoleh input dengan biaya terendah sambil mempertahankan tingkat kualitas dan kuantitas tertentu. Membandingkan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter adalah dasar ilmu ekonomi.
- b. Efisiensi : Gagasan produktivitas dan efisiensi terkait erat. Dengan menggunakan perbandingan output yang dihasilkan dan input yang dikonsumsi (biaya output/*cost of output*), efisiensi diukur. Proses suatu kegiatan operasional dapat dianggap efisien jika produk atau hasil kerja

tertentu dapat diperoleh dengan menggunakan sumber daya dan uang sesedikit mungkin (belanja dengan bijak).

- c. Efektivitas : Pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan (hasil guna) pada dasarnya terkait dengan konsep efektivitas. Korelasi antara output dan hasil yang diinginkan disebut efektivitas. Ketika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran kebijakan (belanja dengan hati-hati), dianggap bahwa kegiatan operasional efektif. Atau, dapat digambarkan sebagai sejauh mana hasil program memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas, dalam bentuknya yang paling sederhana, adalah rasio hasil terhadap keluaran.

Value for money terutama terdiri dari tiga aspek diatas ini, sementara yang lain berpendapat bahwa hal ini tidak cukup. *Equity*/keadilan dan *equality*/kesetaraan atau merata harus dimasukkan sebagai dua komponen tambahan. Keadilan adalah adanya kemungkinan sosial yang setara untuk mendapatkan layanan publik berkualitas tinggi dan keamanan finansial. Pemerataan (*equality*) merupakan hal yang esensial selain keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dana publik tidak hanya difokuskan pada populasi tertentu saja tetapi juga telah didistribusikan secara merata.

3. Perhitungan *Value For Money*

Mengevaluasi tingkat input, output, dan hasil dalam kaitannya dengan visi dan tujuan organisasi yang terhubung sebelum menghitung nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dibawah ini adalah salah satu cara untuk mengukur tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas :

a. Pengukuran Nilai Ekonomis

1. Ekonomi adalah praktik membeli persediaan tertentu dengan biaya serendah mungkin. Ekonomi adalah perbandingan input dan nilai input yang dipresentasikan dalam satuan moneter. Ekonomi berkaitan dengan seberapa baik organisasi sektor publik dapat mengelola sumber daya mereka dengan mengurangi pengeluaran yang boros dan tidak efektif.
2. Ukuran ekonomi hanya memperhitungkan input yang digunakan, sedangkan ukuran efektivitas hanya memperhitungkan perolehan output. Ekonomis adalah ukuran *relative*.
3. Rumus mengukur Ekonomis :

$$\text{Ekonomis} = \text{Input} / \text{Input Value} \times 100\%$$

Keterangan :

Input = Realisasi Anggaran

Input Value = Anggaran

Menurut Mardiasmo (2016), krieteri ekonomis yaitu :

- a. Ketika nilai perbandingan turun di bawah 100% ($X < 100\%$) artinya Ekonomis
- b. Apabila didapatkan nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) artinya Ekonomis berimbang
- c. Apabila didapatkan nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) artinya tidak Ekonomis.

b. Pengukuran Nilai Efisiensi

1. Efisiensi dasarnya sama dengan ide produktivitas. Dengan membandingkan output dengan input, begitulah efisiensi diukur. Jika suatu produk atau output tertentu dapat diproduksi dengan sumber daya (input dan uang) yang paling sedikit, proses kegiatan operasional dapat dianggap efisien.
2. Dalam pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi bisa dibagi menjadi dua yakni efisiensi alokasi dan efisiensi teknis (manajerial).
3. Rumus mengukur Efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input} / \text{Output} \times 100\%$$

Keterangan :

Output = Jumlah rencana program yang ingin dicapai

Input = Realisasi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2016), kriteria Efisiensi yaitu :

- a. Apabila didapatkan nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) artinya tidak Efisien.
- b. Apabila didapatkan nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) artinya Efisiensi berimbang.
- c. Apabila didapatkan nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) Efisien.

c. Pengukuran Nilai Efektivitas

1. Kinerja yang efektif atas dasar tertentu terkait dengan pencapaian tujuan atau indikator kinerja utama. Hubungan antara target yang harus

dicapai dan output yang diinginkan inilah yang dimaksud dengan efektivitas. Tindakan operasional dianggap berhasil jika tindakan rangkaian mencapai tujuan pertama dan terakhir. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Efektivitas dipahami sebagai evaluasi keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebuah organisasi dapat dianggap beroperasi secara efektif jika berhasil dalam memenuhi tujuannya. Penting untuk dipahami bahwa efektivitas tidak menunjukkan seberapa banyaknya biaya yang telah organisasi habiskan untuk mencapai tujuannya.

3. Mengukur Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \text{Realisasi Anggaran} / \text{Target Anggaran} \times 100\%$$

Menurut Mardiasmo (2016), kriteria Efektivitas yaitu :

- a. Apabila didapatkan nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) artinya tidak Efektivitas.
- b. Apabila didapatkan nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) artinya Efektivitas berimbang.
- c. Apabila didapatkan nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) artinya Efektivitas.

4. Manfaat *Value For Money*

Menurut Jamaluddin (2019) manfaat konsep *value for money* pada organisasi sektor publik, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi pelayanan publik sehingga dapat disampaikan secara efektif dan tepat waktu.
- b. Meningkatkan tingkat kualitas pelayanan publik.
- c. Menurunkan biaya layanan publik melalui penghapusan inefisiensi dan pemanfaatan sumber daya yang hemat biaya.
- d. Penyaluran dana yang lebih mengutamakan kepentingan umum.
- e. Meningkatkan kesadaran biaya publik (*public cost awareness*) adalah landasan mengadopsi akuntabilitas publik.

Agar suatu instansi pemerintah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat waktu serta dengan tetap menciptakan kualitas pelayanan yang baik dengan tetap memanfaatkan sumber daya secara ekonomis dan efisien, maka penerapan *value for money* dalam menilai kinerja organisasi sektor publik sangat bermanfaat. Seperti yang terlihat dari banyak manfaat yang diuraikan di atas.

2.2 Tinjauan Empiris

Meskipun beberapa penelitian menggunakan metodologi kuantitatif, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena peneliti dalam penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menyatukan konsep *value for money*, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dengan memanfaatkan pengertian *value for money*, serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi publik yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat luas. Gambaran penelitian terdahulu yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan penelitian disajikan di bawah ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Jumardi Achmad, Haeruddin Saleh, Cahyono (2020) <i>Indonesian Journal of Business and Management</i>	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah Luwu Timur.	Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemda Kab. Luwu Timur. Partisipasi penyusunan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemda Kab. Luwu Timur. Dari hasil pengujian regresi, <i>variable</i> yang dominan	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dari segi jenisnya dimana penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada <i>variable</i> yang diteliti yaitu akuntabilitas dan transparansi

			berpengaruh terhadap kinerja anggaran para Kantor Pemda Kab. Luwu Timur adalah partisipasi penyusunan anggaran.		
2	Arip Rahman Sudrajat (2021) <i>Journal Education and Development</i> Institusi Pendidikan Tapanuli Selatan	Akuntabilitas dan Transparansi Publik : Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kab. Sumedang	Hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Daerah Kab. Sumedang sudah mengupayakan memberikan pelayanan berdasarkan kepentingan umum melalui program-program yang dapat mengembangkan sumber daya aparatur daerahnya seperti pemberian kesempatan bagi setiap aparatur untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kemampuan dan	Perbedaan pada penelitian ini terletak dari tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi pada SKPD Kab. Sumedang	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak dari variable penelitian yaitu akuntabilitas dan transparansi dan dari segi metode yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis triangulasi data.

			keahliannya, penempatan setiap aparat sesuai kemampuan yang dimiliki sebagai penggerak organisasi agar dapat meningkatkan motivasi kerja dan penerapan aturan-aturan yang beraku dan penerapan uraian tugas yang jelas.		
3	Anita, Moh. Rusman Ramli (2021) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon ISSN 2747-2779 (Onlien)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Sarana <i>Good Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemerintah di Desa Tuangila telah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa terkait dengan Anggaran Desa (APBDesa) tahun 2018.	Perbedaan yaitu pada penelitian ini memfokuskan penelitian di sebuah desa	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada <i>variable</i> yang diteliti yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
4	Budi Prihatminingtyas, Whinny	Analisis Transparansi dan	Hasil penelitian yaitu	perbedaan pada penelitian ini tidak	Persamaan pada penelitian ini

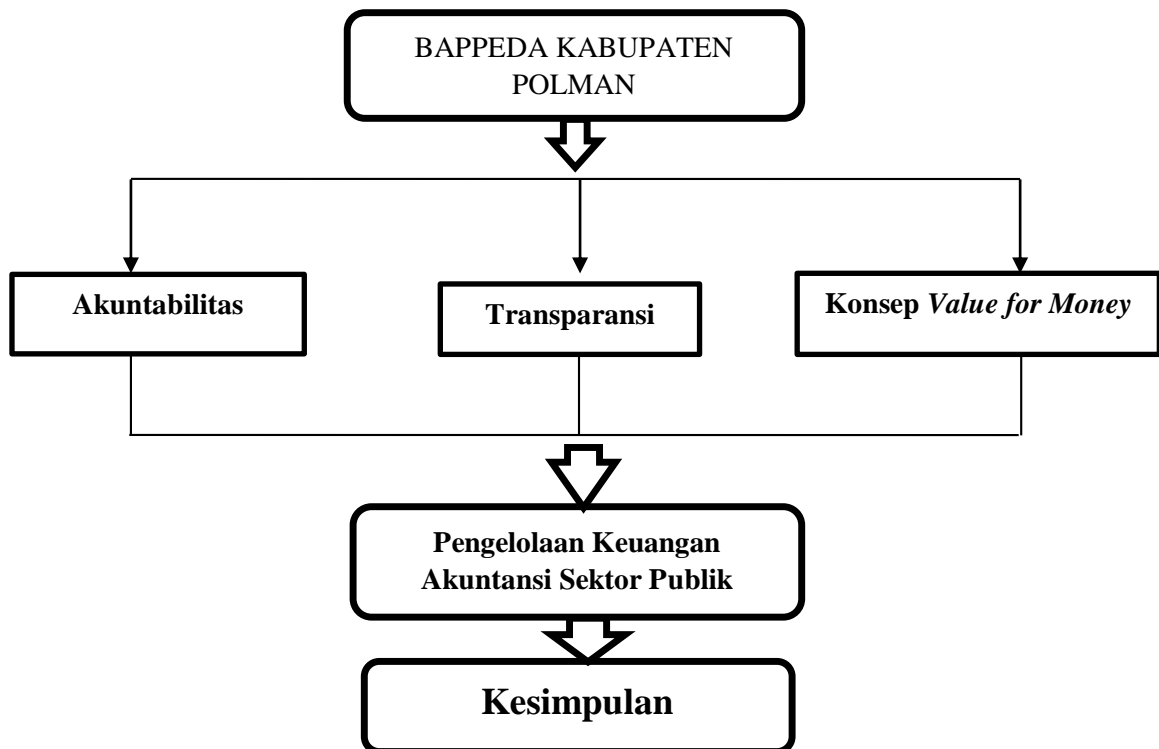
	<p>Qori Fatima, Livia Khairunnisa (2021) Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol.9, No.1</p>	<p>Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun Desa Ngajum Kab. Malang</p>	<p>pengelolaan keuangan masih tergolong sederhana, karena berasal dari infaq, sodaqoh, dan donator tetap. Laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No.45, karena laporan keuangan hanya sebatas pemasukan dan pengeluaran kas, dan belum tergolong akuntabel, karena kurangnya pemahaman pengelola panti asuhan tentang manajemen keuangan, namun sudah transparan yang sederhana, karena laporan keuangan panti asuhan hanya diberikan kepada yang ingin mengetahui tentang laporan keuangan di panti asuhan.</p>	<p>adanya <i>variable value for money</i> hanya meneliti <i>variable</i> transparansi dan akuntabilitas saja.</p>	<p>terlekat pada poin-poin penelitiannya yaitu analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan</p>
--	--	---	---	---	---

5	Aries Iswahyudi, Iwan Triuwono, M. Achsin (2016) Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol.1, No.2, Hal:151-166, Des.2016	Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, <i>Value For Money</i> , dan <i>Good Goveranance</i> .	Hasil analisis menunjukkan bahwa <i>good governance</i> tidak berjalan dengan baik karena <i>variable akuntabilitas</i> tidak berpengaruh secara positif, <i>variable value for money</i> tidak berpengaruh secara positif. Sedangkan <i>variable partisipasi</i> berpengaruh secara <i>negative</i> dan <i>variable transparansi</i> berpengaruh positif terhadap <i>good governance</i> .	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan terdapat <i>variable partisipasi</i> pada penelitian ini.	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada <i>variable</i> transparansi, akuntabilitas dan konsep <i>value for money</i>
---	---	---	---	---	---

2.3 Kerangka Berpikir

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemampuannya mengelola kinerja keuangannya sendiri. Semakin baik pengelolaan keuangan di suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mampu mewujudkan *good governance* salah satunya dengan menerapkan prinsip 3E (Ekonomis, Efektif, Efisien) / *value for money*.

Value for money harus digunakan dalam organisasi sektor publik dengan cara yang konsisten dengan perluasan undang-undang akuntabilitas publik dan penerapan tata kelola yang baik. Penerapan gagasan dengan konsep *value for money* yaitu untuk memastikan bahwa uang rakyat telah dikelola untuk kepentingan umum dan dikelola secara ekonomis. Penerapan konsep ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas sektor publik dan meningkatkan kinerja sektor publik melalui peningkatan efisiensi pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan biaya pelayanan publik akibat inefisiensi dan peningkatan kesadaran akan penggunaan uang rakyat.



Gambar 2.3
Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan kajian, dapat dikatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah berhasil menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Transparansi pada BAPPEDA Kab. Polewali Mandar di kategorikan telah berhasil, terbukti dengan adanya website resmi yang dapat diakses secara umum melalui jaringan internet. Selain penyediaan website, adapula proses Musrembang yang diadakan oleh BAPPEDA Kab. Polewali Mandar yang dimana pada proses ini pihak BAPPEDA akan mendengarkan usulan-usulan atau masukan dari masyarakat untuk kemudian akan dipertimbangkan pada program kerja yang akan dilakukan kelak.

Selain transparansi, Akuntabilitas pada BAPPEDA Kab. Polewali Mandar juga bisa dikatakan telah berhasil karena dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang harus dibuat jika ingin melakukan suatu pencairan dana kegiatan karena jika tidak membuat laporan pertanggungjawaban maka dana kegiatan tidak akan bisa cair.

Penerapan konsep *value for money* yang dilihat dari segi ekonomi, pengukuran kinerjanya dianggap berhasil karena tingkat rasio ekonomi keempat program kerja yang telah dilakukan sudah masuk kategori ekonomis seperti yang telah dikemukakan oleh Mardiasmo (2016) yang menyatakan bahwa jika nilai perbandingan berada dibawah 100% ($X < 100\%$) maka akan dikatakan Ekonomis.

Dari segi efisiensi dapat dikatakan nilai presentase output program kerja mencapai 94%. Dikatakan bahwa pengukuran kinerja efisiensi program kerja kurang efisien. Walaupun seluruh program kerja dan kegiatan dalam program kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan hasil atau target yang diinginkan, namun persentase hasil perhitungannya kurang dari 100%, hal ini sesuai dengan justifikasi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016) yang dimana, jika nilai presentase dibawah 100%, maka itu tidak bisa lagi dicirikan sebagai efisien.

Dari perspektif pengukuran kinerja efektivitas dapat dikatakan bahwa sistem ini belum efektif karena nilai presentasi yang diperoleh berada pada kisaran 100% kebawah yang dimana sesuai dengan pendapat dari Mardiasmo (2016), yang menurutnya jika nilai perbandingannya dibawah 100% ($X < 100\%$), maka hal ini masuk kedalam kategori belum efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Polewali Mandar dituntut untuk mengoptimalkan keterbukaan. Informasi yang menyeluruh, informatif, dapat dipercaya, dan relevan harus disediakan.
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Polewali Mandar diharapkan dapat memaksimalkan prinsip Akuntabilitas. Akuntabilitas yang baik berupaya meminta pertanggungjawaban masyarakat atas pengelolaan keuangan sektor publik.
3. Diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Polewali Mandar agar dapat memperhatikan segala aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam melaksanakan program, kegiatan, atau pengelolaan keuangan sehingga sumber daya yang dikelola dapat dimanfaatkan seefektif mungkin sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achamd, J. Saleh, H. (2020). "Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Timur.", *Indonesian Journal of Business and Management*, Vol.2, No.2, Hal.105-111.
- Anggadini. Dewi, S. (2012). Pengaruh *Value For Money* Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi*. Bandung: Universitas Computer Indonesia.
- Auditya, L. Listiawati, H. (2013). "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Fairness* Vol.3, No.1, Hal. 21-42.
- Auditya, Lucy, Husaini, Dan Lismawati. (2013). "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Fairness*, Vol.3, No.1, Hal.21-41.
- Bahri, S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung : Media Sains Indonesia.
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo : Umsida Press.
- Edowai, M. Abubakar, H. Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almada.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Inpres No.7 Tahun 1999
- Laoli, V. (2019). "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kabupaten Nias". Vol.3, No.1, Hal.91.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa - Sulawesi Selatan : Pusaka Almada.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Indonesia : Andi Yogyakarta.
- Nandy, (2022). Efisiensi: Pengertian, konsep, jenis, manfaat dan tolak ukurnya. Retrieved From <https://www.gramedia.com/best-seller/efisiensi/>
- Nasution, D.A.D. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. AQLI Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*. Vol.2, No.3. Hal.149-161
- Oktafiani, P. Harjanti, R.S. Mulyadi. (2021). Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Rsud Brebes. Tugas Akhir Prodi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

- Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jakarta.
- Permendagri (*Peraturan Kementerian Dalam Negeri*) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pertiwi. Putri, D. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Kebangsaan*. Vol.2 No.2. Hal.1-15.
- Sahir, M. (2022). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik Dalam Mencapai *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Kota Makassar.*Skripsi*.Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sanjaya, D.H. (2019). Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* e-ISSN: 2460-0585. Vol.8, No.12. Hal.1-16
- Sinaga, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Instansi Pemerintah Di Kbaupaten Batu Bara. *Skripsi*. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Penerbit CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Cv Alfabeta.
- Umuri, H. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Marisa. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Vol.53 No.9. Hal.1689-1699.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah.
- Wicaksono, K.W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (Jkap)*. Vol.19, No.1.Hal.3-11